

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi berasal dari kata *ko* yang berarti bersama dan *operasi* memiliki pengertian bekerja, sehingga secara harfiah koperasi bermakna sama-sama bekerja. Perkumpulan koperasi ialah suatu kelompok yang melakukan kerja sama untuk mencapai tujuan (Siwijatmo, 1982: 13). Sementara itu, definisi koperasi yang lebih luas adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya melalui perusahaanyang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis (Soerdjono, 2002: 9).

Berdasarkan kedua pengertian di atas, pada intinya koperasi disebut sebagai suatu organisasi atau perkumpulan orang-orang yang di dalamnya melakukan hubungan kerja sama ekonomi secara gotong royong dengan landasan kekeluargaan. untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Koperasi diibaratkan sebagai sebuah keluarga yang memerlukan tanggung jawab sepenuhnya dari setiap anggotanya untuk tetap berusaha memakmurkan koperasi (Hatta, 1954: 203). Setiap anggota koperasi harus menyadari dan bahu membahu memajukan koperasi dengan memiliki rasa tanggung jawab sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama agar tujuan dapat terpenuhi.

Tujuan koperasi yang terdekat yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup anggotanya, sedangkan tujuan koperasi nasional adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Sagimun 1983:27). Dengan bekerja sama yang dilandasi rasa persaudaraan kaum ekonomi

lemah bersatu dan saling membantu untuk meningkatkan taraf hidupnya. Eksistensi koperasi diharapkan mampu menciptakan kemandirian ekonomi serta menjadi solusi menghadapi kesulitan ekonomi di Indonesia. Hal ini dijelaskan Muhammad Hatta dalam bukunya "*Beberapa Pasal Ekonomi*":

Sejak semula pergerakan kebangsaan Indonesia dahulu kuat membangkitkan semangat "*self help*". Jika engkau hendak maju, berusahalah sendiri dengan tidak mengharapkan pertolongan orang lain, demikianlah kira-kira ujudnya semboyan itu. dan bagi rakyat yang lemah ekonominya tiada jalan lain yang terpakai bagi memajukan usahanya selain dari pada koperasi. Koperasi adalah senjata persekutuan bagi si lemah untuk mempertahankan hidupnya.

Koperasi pada awalnya bertujuan untuk menyalurkan pinjaman kepada rakyat luas. Hal ini diprakarsai oleh Raden Aria Wiriadmadja (Patih Purwokerto) menyarankan kepada atasannya Asisten Residen De Wolf van Westerrode untuk mendirikan Bank Pertolongan dan Tabungan (*Hulf en Spaar Bank*). Selanjutnya koperasi mulai diperkenalkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan Hindia Belanda melalui kegiatan penerangan koperasi kepada masyarakat.

Sementara di lain pihak pun, organisasi perkumpulan rakyat pribumi mengembangkan hal yang sama. Boedi Oetomo membuka Koperasi Rumah Tangga dan Syarikat Dagang Islam (SDI) mengembangkan propaganda cita-cita koperasi kepada masyarakat sehingga pada saat itu berdiri toko-toko koperasi. Tujuan yang dikembangkan oleh kedua perkumpulan bangsa pribumi ini merupakan upaya untuk memperkuat jalinan persaudaraan di antara kaum pribumi dan sekaligus sebagai sarana menghimpun kekuatan melakukan perlawanan secara kooperatif terhadap Pemerintah Kolonial Belanda. Sedangkan pada masa kekuasaan Jepang, koperasi berubah fungsi menjadi *kumiai* yang bertugas mengeksploitasi barang-barang milik rakyat pribumi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Jepang dalam menghadapi Perang Pasifik.

Koperasi kemudian mulai berkembang pesat pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Perkembangan ini ditunjang oleh eksistensi koperasi dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan". Kemudian dalam penjelasannya pun disebutkan "Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat, kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Pencantuman koperasi pada konstitusi merupakan komitmen seluruh bangsa untuk melaksanakannya, terutama pada pundak pemerintah berkewajiban untuk menjabarkannya (Kamaralsyah,dkk, 1987:3). Oleh karena itu, Pemerintah memberikan penerangan kepada masyarakat luas mengenai seluk beluk koperasi melalui Djawatan Koperasi yang berada di bawah naungan Kementrian Kemakmuran bersama Perdagangan Dalam Negeri. Koperasi secara kuantitas berkembang cepat mencapai 2500 lembaga yang tersebar di seluruh wilayah atas secara nasional terbentuk atas prakarsa pengurus koperasi di Jawa Barat yang melakukan koordinasi dengan pengurus koperasi yang ada di daerah lainnya. Gerakan koperasi secara nasional ini dilaksanakan di Tasikmalaya dan menghasilkan sepuluh keputusan penting bagi gerakan koperasi di Indonesia. Salah satu hasil kongres tersebut menyatakan bahwa koperasi adalah soko guru perekonomian Indonesia.

Koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia ini tentunya harus menjadi dasar dan acuan bagi perekonomian nasional. Azas kekeluargaan yang dianut oleh koperasi kiranya menjadi faktor yang menghubungkan dengan jiwa gotong royong yang telah mengakar dalam tradisi bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Dalam koperasi mengutamakan tolong menolong dan saling membantu setiap anggotanya agar mendapatkan kemakmuran bersama. Kegiatan produksi dalam suatu koperasi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilihan anggota. Koperasi merupakan alat perjuangan untuk mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat, di samping itu sumber daya manusia pengurus koperasi juga harus ditingkatkan. Menurut Didin S Damanhuri (1995 : 145) dalam tulisannya mengenai “Perspektif Pemberdayaan Masyarakat” lebih jauh mengatakan:

“.....koperasi serta usaha informal dan tradisional menyimpan potensi yang sangat besar dalam rangka meningkatkan proses demokratisasi ekonomi. Yakni dengan cara meningkatkan kemampuan dan kinerja mereka akan mampu menciptakan kesempatan usaha dan langkah kerja baru sekaligus akan dapat memperkokoh perekonomian rakyat dan bangsa secara keseluruhan.....” (Damanhuri, 1995 : 145)

Jiwa kebersamaan secara demokrasi dalam koperasi terletak pada penentuan kebijakan-kebijakan yang dijalankan. Setiap koperasi wajib melaksanakan penentuan pengurus koperasi yang dilakukan dengan cara melaksanakan musyawarah atau rapat anggota untuk membahas segala hal yang menyangkut koperasi tersebut. Selain itu membentuk kepengurusan, Rapat ini biasanya mengenai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Masing-masing anggota memiliki kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus koperasi. Keuntungan yang dimiliki anggota dari usaha koperasi kemudian akan dibagikan berupa Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai dengan aturan yang telah disepakati sebelumnya.

Aturan yang disepakati dalam koperasi seperti yang telah disebutkan di atas menjadikan koperasi sebagai badan usaha yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan sistem ekonomi kapitalis yang di dalamnya merupakan kumpulan modal dengan pengelolaan secara teraturbertujuan mendapatkan keuntungan individu yang sebesar-besarnya. Perbedaan sistem ekonomi koperasi dengan kapitalis ini dijelaskan oleh Sjamsuri (2002: 20) dalam bukunya yang berjudul *Pendidikan Koperasi Sebagai Vektor Percepatan Pembangunan* menyatakan bahwa kapitalisme berkembang dengan semangat individualisme, sistem persaingan bebas dan dukungan modal yang kuat sedangkan koperasi akan berkembang berdasarkan prinsip kerja sama dan asas tolong menolong.

Sistem ekonomi koperasi secara yuridis mempunyai kedudukan yang kuat di dalam perekonomian Indonesia. Tetapi menurut kenyataan yang ada, koperasi belum dapat berperan sebagaimana mestinya di dalam kehidupan perekonomian di Indonesia. Pada masa kolonialisme koperasi tidak bisa berkembang maksimal karena perekonomian dikuasai oleh negara penjajah yang di dalamnya terkait dengan aturan perkumpulan bangsa pribumi. Pada jaman penjajahan inilah berlaku sistem ekonomi subordinasi, artinya yang di atas mendominasi yang di bawah. Wujud nyata adalah hubungan ekonomi tuan hamba, *taoke-koelie*, juraganburuh dan semacam *economy slavery system*, dimana yang kuat dan berkuasa berkedudukan dominan dan yang lemah tanpa posisi tawar kedudukannya tersubordinasi (Swasono, 2005:7).

Perkembangan koperasi pasca kemerdekaan hingga sekarang juga tidak luput dari kendala yang dihadapi sehingga seringkali berakibat pada bangkrutnya koperasi tersebut. Hambatan ini terletak pada bidang management dan

permodalanyang menyebabkan menurunnya minat masyarakat menjadi anggota koperasi. Para pengurus koperasi kadang kala mengelola keuangan yang tidak transparan. Masalah keuangan hanya dibicarakan pada level pengurus saja akibatnya koperasi berjalan hanya untuk keuntungan perorangan. Hal ini menumbuhkan kecurigaan anggota koperasi sehingga prasangka ini menyebabkan menurunnya kepercayaan anggota koperasi. Sebagai dampak dari hal ini adalah meningkatnya ketidakpercayaan anggota kepada pengurus sehingga menyebabkan kebangkrutan. Di beberapa daerah sering kita temui koperasi tidak lama menyelenggarakan kegiatan ekonominya bahkan hanya mampu bertahan beberapa tahun saja.

Koperasi yang tumbuh di Indonesia cukup beragam jenisnya antara lain koperasi yang dibentuk atas dasar kesamaan kegiatan dan kepentingan anggotanya, (misalnya : koperasi pemasaran, koperasi jasa, koperasi simpan pinjam dan koperasi produsen). Selain itu ada pula koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional dalam hal ini pegawai negeri atau TNI-POLRI. Salah satu yang dibentuk kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) khususnya para guru berbentuk “Koperasi Guru”. Untuk membedakan antar kesatuan koperasi guru sering diberi nama antar daerah tidak sama. Salah satunya Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia “Sejahtera” (KPRI Sejahtera) yang berada di Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya.

Sebagai sebuah studi sejarah perekonomian, kiranya cukup menarik apabila KPRI “Sejahtera” dijadikan objek penelitian. Minat penulis tertuju pada perjalanan koperasi tersebut yang mampu bertahan dari tahun 1962 hingga sekarang ini. Perjalanan panjang sebuah koperasi ini merupakan sebuah kelebihan

mengingat banyak sekali koperasi lain yang hanya bertahan beberapa tahun saja karena tidak mampu menghadapi kendala-kendala. Faktor lain yang menjadi pendorong untuk membahas koperasi tersebut terletak pada implikasi positif karena membantu kesulitan ekonomi yang dihadapi para guru di Kecamatan Cipedes. KPRI “Sejahtera” yang bernaung di bawah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Cipedes, berdasarkan alasan-alasan inilah penulis akan mengangkatnya dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi dalam judul “Perkembangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Sejahtera” Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya tahun 1974-2000).

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan materi skripsi ini tidak terlalu luas, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan yang ada kaitannya dengan berdirinya Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Sejahtera” Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya dalam bentuk pertanyaan antara lain :

1. Bagaimana latar belakang berdirinya Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Sejahtera” Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya ?
2. Bagaimana manfaat KPRI “Sejahtera” yang dirasakan pengurus maupun anggotanya ?
3. Bagaimana perkembangan KPRI “Sejahtera” Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya sejak didirikannya sampai dengan tahun 2000 ?
4. Apa kendala yang dihadapi oleh KPRI “Sejahtera” dan bagaimana cara mengatasinya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini secara tidak langsung adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Skripsi ini dihasilkan melalui penelitian disertai dengan bimbingan secara berkala terhadap Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah ditentukan sebelumnya serta berkaitan dengan bidangnya. Masukan-masukan yang diberikan dosen pembimbing tersebut tentunya memberikan arahan yang berarti bagi penulis dan dijadikan acuan untuk dapat memperbaikinya.

Sedangkan tujuan secara khusus dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui latar belakang berdirinya KPRI “Sejahtera” Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui manfaat yang dirasakan oleh Pegawai Negeri di Jajaran Dinas Pendidikan Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui perkembangan KPRI Sejahtera, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya sejak berdirinya sampai tahun 2000.
4. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh KPRI “Sejahtera” dan cara-cara mengatasinya.

D. Definisi Istilah

Istilah koperasi berasal dari kata *ko* yang berarti bersama dan *operasi* memiliki pengertian bekerja, sehingga secara harfiah koperasi bermakna sama-sama bekerja. Perkumpulan koperasi ialah suatu kelompok yang melakukan kerja sama untuk mencapai tujuan (Siwijatmo, 1982:13). Sementara itu, definisi koperasi yang lebih luas adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara

sukarela untuk memenuhi kebutuhan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis (Soerdjono, 2002: 9).

Kedua pengertian di atas, pada intinya koperasi disebut sebagai suatu organisasi atau perkumpulan orang-orang yang di dalamnya melakukan hubungan kerja sama ekonomi secara gotong royong dengan landasan kekeluargaan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

Sedangkan pengertian koperasi menurut Undang-undang Perkoperasian No.25 Tahun 1992, koperasi adalah “badan usaha yang beranggotakan orang seorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.” Definisi ini merupakan penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang memperjelas kembali eksistensi koperasi dalam sistem perekonomian Indonesia.

Chaniago (2001:17) mendefinisikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Sementara itu, menurut Siti dan Tamba, (2001:18) koperasi didefinisikan sebagai organisasi tolong menolong yang menjalankan “urusniaga” secara kumpulan yang berazaskan konsep tolong menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong.

Selain pengertian koperasi di atas, ada beberapa definisi lain, diantaranya : *International Cooperative Alliance (ICA)* menyatakan bahwa koperasi adalah kumpulan orang atau badan hukum, yang bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya dengan jalan berusaha bersama-sama saling membantu antara satu dengan lainnya dengan cara membatasi keuntungan, usaha tersebut harus didasarkan prinsip koperasi (Hendar dan Kusnadi, 1999:11) Berkenaan dengan pandangan tentang organisasi koperasi Perserikatan Buruh sedunia atau *International Labour Organization (ILO)* yang dikutip dalam

Syamsuri (1999:52) mengemukakan :

”Suatu organisasi koperasi adalah suatu perkumpulan dari sejumlah organisasi yang bergabung secara sukarela untuk mencapai suatu tujuan yang sama melalui pembentukan suatu organisasi yang diawasi secara demokratis melalui penyeteroran suatu kontribusi yang sama untuk modal yang diperlukan dan melalui pembagian resiko serta manfaat yang wajar dari usaha dimana para anggotanya berperan serta secara aktif”.

Berdasarkan pengertian koperasi diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan organisasi yang terdiri dari orang-orang atau badan-badan yang bekerja secara sukarela berdasarkan pada asas kekeluargaan dengan menggunakan prinsip-prinsip koperasi, dan setiap anggota koperasi memiliki identitas ganda yaitu sebagai pemilik sekaligus pelanggan koperasi, selain itu motif koperasi tidak mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa aturan tetapi selalu mengedepankan tujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada anggotanya demi tercapai kesejahteraan bersama.

Koperasi biasanya terbentuk akibat adanya kepentingan yang sama dalam rangka meningkatkan taraf hidup anggotanya. Oleh karena itu banyak sekali

koperasi yang terbentuk dari golongan-golongan seperti halnya Koperasi Pegawai Negeri Sipil. Salah satu yang dibentuk kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) khususnya para guru berbentuk “Koperasi Guru”. Untuk membedakan antar kesatuan koperasi guru sering diberi nama antar daerah tidak sama. Salah satunya Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia “Sejahtera” (KPRI Sejahtera) yang berada di Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berupa susunan tahapan-tahapan penulisan yang disusun secara berurutan (sistematis) agar historiografi ini sesuai dengan ketentuan. Adapun Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab, yakni:

1. Bab I Pendahuluan

Pada tahap pendahuluan ini akan dijelaskan latar belakang pengangkatan judul penelitian sehingga pembaca dapat memahami alasan penulis. Selain itu, pada bab ini diuraikan pula perumusan masalah dan tujuan penulisan baik secara langsung maupun tidak langsung serta definisi istilah yang berkaitan dengan judul skripsi.

2. Bab II Tinjauan kepustakaan

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang mengemukakan sumber-sumber yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini. Tinjauan kepustakaan dikembangkan melalui penelaahan secara mendalam terhadap buku-buku yang berhubungan dengan tema penelitian yang akan dikaji. Sumber-sumber yang diperoleh penulis dalam menyusun skripsi ini berupa tulisan ilmiah para ahli sejarah. Sumber-sumber literatur yang didapatkan

oleh penulis dalam tahap pencarian dan pengumpulan sumber sejarah. Pada bagian tinjauan pustaka ini, penulis mencoba untuk menganalisa penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai objek kajian yang sama. Kemudian, meletakkan kedudukan masing-masing sehingga jelas hal apa yang belum tersentuh oleh penelitian-penelitian terdahulu.

3. Bab III Metodologi penelitian

Metode dapat diartikan rangkaian proses keseluruhan cara yang tersistematis dalam melakukan sebuah penelitian. Metodologi penelitian berisi pemaparan langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam mengadakan penelitian ini. Dalam karya tulis ini tentunya menggunakan metode penelitian sejarah yang berkaitan dengan kajian penelitian ini. Metode penelitian sejarah ini terbagi menjadi empat tahap yaitu ; heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

4. Bab IV Pembahasan

Pada bab IV ini penulis akan menjelaskan mengenai hasil penelitian serta di dalamnya berupa temuan-temuan yang didapat pada proses penelitian. Proses penelitian ini tentunya berdasarkan metode penelitian sejarah seperti yang telah dijelaskan di atas. Pembahasan merupakan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang dikemukakan dalam bentuk pertanyaan pada perumusan masalah.

5. Bab V Kesimpulan dan saran

Dalam bab kesimpulan dan saran ini berisi kesimpulan diambil dari penelitian yang dilakukan dengan teliti dan sistematis. Selain itu, pada bab ini pula dikemukakan saran-saran atau masukan yang dianalisis dari kekurangan yang akan bermanfaat bagi objek yang diteliti maupun masyarakat luas.